

## Analisis Prosedur Audit Kepatuhan Belanja pada Universitas ABC oleh Kap Kanaka Puradiredja, Suhartono Cabang Surabaya

Ira Sukma Yuliawati<sup>1</sup>, Diah Hari Suryaningrum<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

21013010154@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>, diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the shopping compliance test procedures at ABC University implemented by the Kanaka Puradiredja Public Accounting Office, Suhartono Surabaya Branch. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach and the technical data analysis used is descriptive analysis which is used to describe the shopping compliance test procedures implemented by KAP Kanaka. The shopping compliance audit procedure at ABC University is carried out by asking clients for data, then doing sampling, asking clients for data, vouching, and confirming if things are found that are not clear. The test results relating to the expenditure compliance test carried out by KAP Kanaka show that ABC University has fulfilled material matters, both internal control compliance and compliance with legislation. In terms of value and transactions, there were no differences in recording, so it can be ensured that transactions have been presented accurately.*

**Keywords:** *audit procedures, vouching, shopping compliance tests*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur tes kepatuhan belanja pada Universitas ABC yang diterapkan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono Cabang Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan prosedur tes kepatuhan belanja yang diterapkan oleh KAP Kanaka. Prosedur audit kepatuhan belanja pada Universitas ABC dilakukan dengan cara meminta data pada klien, kemudian melakukan sampling, meminta data pada klien, melakukan vouching, melakukan konfirmasi apabila menemukan hal-hal yang kurang jelas. Hasil pengujian yang berkaitan dengan tes kepatuhan belanja yang dilakukan KAP Kanaka menunjukkan bahwa Universitas ABC telah memenuhi hal-hal yang material baik kepatuhan pengendalian secara internal maupun kepatuhan pada perundang-undangan. Secara nilai dan transaksi tidak ditemukan perbedaan pencatatan, sehingga dapat dipastikan bahwa transaksi telah tersaji secara akurat.

**Kata Kunci:** *prosedur audit, vouching, tes kepatuhan belanja*

### PENDAHULUAN

Lembaga sektor publik merupakan lembaga yang aktivitas utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu lembaga yang bergerak pada bidang sektor publik adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah lembaga pendidikan tertinggi yang menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi diwajibkan oleh pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dengan tata kelola yang efektif. Hal ini karena peran penting perguruan tinggi dalam kemajuan suatu negara. Meskipun

termasuk organisasi sektor publik suatu universitas tidak luput dari adanya tindakan fraud. Ada beberapa jenis fraud yang ada pada perguruan tinggi misalnya penyuapan, penggelapan dana, dan korupsi anggaran internal pada perguruan tinggi.

Berdasarkan data dari KPK sepanjang tahun 2004 sampai dengan 2019, jenis perkara tindak korupsi yaitu; penyuapan sebesar 65%, pengadaan barang dan jasa sebesar 21%, penyalahgunaan anggaran sebesar 5%, TPPU sebesar 3%, Pungutan/pemerasan sebesar 3%, perizinan sebesar 2%, dan lainnya sebesar 1%. Dari data tersebut tercatat bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan peringkat kedua tindak korupsi terbanyak yang ditangani oleh KPK. Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang menjadi sasaran untuk dikorupsi, karena pada praktiknya pengadaan barang dan jasa melibatkan uang dengan jumlah yang sangat besar sehingga dalam penggunaannya rawan terjadi penyelewengan.

Untuk mencegah adanya korupsi pengadaan barang dan jasa suatu perguruan tinggi harus melakukan suatu pengawasan secara internal terlebih dahulu agar kasus penyelewengan pengadaan barang dan jasa tidak terjadi dengan cara memaksimalkan fungsi dari Sistem Pengendalian Internal (SPI). Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No 47 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2). Pengawasan oleh SPI bertujuan untuk melaksanakan kontrol dan pengawasan. Sehingga laporan keuangan bisa disajikan secara andal, kegiatan operasi berjalan secara efektif, dan perguruan tinggi patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Setelah pengawasan secara internal telah dilaksanakan maka diperlukan pengawasan secara eksternal, misalnya dengan menggunakan jasa auditor. Audit eksternal juga diperlukan untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam penyelewengan aset. Meskipun auditor hanya memiliki waktu dan penyidikan yang terbatas, mereka dapat membantu auditor internal dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi di organisasi. Selain itu, auditor eksternal juga dapat memberikan opini yang dapat mempermudah auditor internal dan pihak organisasi dalam mendeteksi kecurangan. Dengan menggunakan jasa auditor maka laporan keuangan akan dibedah satu persatu untuk memeriksa suatu hal yang salah dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk melakukan pengawasan dalam praktik pengadaan barang dan jasa maka auditor akan melakukan suatu tes yang dinamakan tes kepatuhan belanja agar terwujud pemerintah yang bersih dan taat pada hukum yang berlaku.

## TINJAUAN LITERATUR

### Prosedur Audit

Prosedur audit merupakan suatu tata cara atau langkah untuk melaksanakan pemeriksaan. Apabila ditemukan bukti pada pemeriksaan, auditor harus mengevaluasi peluang adanya hal yang berpotensi terjadinya kecurangan. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat guna mendukung opini audit tentang kewajaran laporan keuangan atau ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Prosedur audit mencakup berbagai teknik dan metode yang dirancang untuk menilai keakuratan, kelengkapan, dan validitas informasi yang disajikan oleh entitas.

### Sampling Audit

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang memiliki karakteristik representatif. Untuk menetapkan sampel yang tepat, peneliti harus memiliki pemahaman yang baik tentang proses sampling, termasuk dalam menentukan jumlah dan memilih sampel yang diambil. Kesalahan dalam menentukan populasi dapat menyebabkan data yang dikumpulkan menjadi tidak tepat, sehingga hasil penelitian menjadi tidak berkualitas, tidak representatif, dan tidak memiliki daya generalisasi yang baik.

### Vouching

Pemeriksaan bukti pendukung atau yang biasa disebut dengan vouching adalah prosedur audit yang meliputi inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang menunjang suatu transaksi ataupun informasi keuangan untuk menentukan kewajaran serta kebenarannya. Perbandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan (Ramadhani, Andi Auliya dkk. 2021).

Vouching bertujuan untuk melacak kebenaran dari suatu transaksi dengan cara memvalidasi suatu dokumen maupun bukti transaksi yang membuktikan bahwa transaksi tersebut terjadi secara sah dan memastikan bahwa bukti tersebut telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang.

### Tes Kepatuhan Belanja

Audit Kepatuhan adalah proses untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mematuhi prosedur, standar, dan aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Auditor internal bertugas memastikan bahwa proses kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan aturan tersebut (Alfuzanni, dkk., 2019). Tes Kepatuhan belanja bertujuan untuk menilai seberapa patuh sebuah perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal maupun eksternal. Selain itu, tes kepatuhan belanja juga berfungsi untuk mengamankan pengadaan barang dan jasa serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan karakteristik utama yang terdapat di dalam penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrumen kunci yakni dengan menyajikan data data dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan tidak berupa angka-angka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena peneliti ingin menggali lebih dalam tentang informasi yang berkaitan dengan prosedur tes kepatuhan belanja yang dilakukan oleh KAP Kanaka agar mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan audit kepatuhan belanja.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

1. Observasi yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati dan memahami objek penelitian, yaitu Universitas ABC untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
2. Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati dan menyimpan informasi, sebagai pendukung penelitian
3. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan mengenai tes kepatuhan belanja kepada auditor di Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono.

Subjek penelitian ini adalah Universitas ABC yang merupakan perguruan tinggi merupakan salah satu klien dari KAP Kanaka. Sumber data dari penelitian berasal dari wawancara, laporan keuangan, dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Analisis pada penelitian ini bertujuan untuk memahami apa saja prosedur tes kepatuhan belanja dan bagaimana tata cara untuk melakukan tes kepatuhan belanja yang diterapkan oleh KAP Kanaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tes Kepatuhan Belanja

Audit tes kepatuhan belanja yang dilaksanakan oleh KAP Kanaka pada Universitas ABC yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik, termasuk pemberi dana, pengguna layanan, dan masyarakat luas. Pembahasan tes ini mencakup evaluasi terhadap berbagai tahapan dalam siklus pembelian, mulai dari permintaan belanja, persetujuan, pembuatan pesanan, penerimaan barang atau jasa, hingga pembayaran. Pentingnya tes kepatuhan ini terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi potensi kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedur, yang dapat mengakibatkan risiko seperti penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.

Dengan mengamati dokumen transaksi dan melakukan wawancara dengan stakeholders terkait, tes ini tidak hanya memverifikasi keakuratan administrasi tetapi juga mendeteksi masalah sistemik yang memerlukan perbaikan. Hasil tes memberikan rekomendasi perbaikan yang memungkinkan organisasi meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Secara keseluruhan, tes kepatuhan

belanja menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya dalam praktik manajemen keuangan suatu entitas. Saat melaksanakan tes kepatuhan belanja terdapat tahapan yang perlu dilakukan yaitu:

*“Alur pelaksanaan tes kepatuhan belanja:*

1. *Meminta daftar lengkap pengadaan barang dan jasa dalam periode yang sedang diaudit.*
2. *Melakukan sampling dari daftar tersebut*
3. *Meminta dokumen pendukung yang lengkap atas belanja yang dilakukan sampling*
4. *Setelah dokumen pendukung diterima maka dilakukan pemeriksaan mulai dari kebenaran jumlah belanja, kelengkapan dokumen pendukung, kelengkapan persetujuan pihak berwenang, kebenaran prosedur yang dilaksanakan dalam pelaksanaan belanja.*
5. *Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada manajemen jika ditemui hal - hal yang perlu ditanyakan, diperjelas dan/atau yang tidak sesuai”.*

Berdasarkan penjelasan auditor di atas, untuk melakukan tes pengadaan barang dan jasa langkah awal yang harus dilakukan adalah meminta daftar pengadaan barang dan jasa, melakukan sampling, meminta dokumen pendukung yang lengkap, melakukan vouching, dan melakukan konfirmasi kepada manajemen apabila diperlukan.

## **1) Melakukan sampling**

Sampling yang dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa pada Universitas ABC diperlukan untuk memperoleh objek sampling yang sesuai dan bisa mewakili keseluruhan dari pengadaan barang dan jasa untuk dijadikan sebagai objek yang akan dilakukan audit. Audit sampling memungkinkan auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit mengenai beberapa karakteristik elemen yang dipilih, yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi asal sampel tersebut. Audit sampling dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik atau nonstatistik. Cara melakukan sampling yang dilakukan oleh KAP Kanaka yaitu dengan cara meminta daftar pengadaan barang dan jasa selama tahun audit, untuk Universitas ABC tahun auditnya adalah tahun 2023. Kemudian ketika sudah menerima daftar pengadaan dan jasa dari klien, auditor menganalisis dan memilih beberapa transaksi dengan nilai yang terbesar.

No	Unit	Tanggal	Uraian	Nomor akun	Nominal
1	TU Fakultas Kedokteran	06/11/2023	Pembayaran pengadaan lab. Pembelajaran dan mikroskopik fak. Kedokteran	537112	849.150.000
2	TU Fakultas Kedokteran	14/11/2023	Pembayaran pengadaan alat lab. Fakultas kedokteran	537112	11.300.000
3	TU Fakultas Kedokteran	21/11/2023	Pembayaran pengadaan komputasi fakultas kedokteran	537112	148.600.000
4	TU Fakultas Kedokteran	21/11/2023	Pembayaran pengadaan alat lab fakultas kedokteran	537112	39.500.000
5	TU Fakultas Kedokteran	11/12/2023	Pembayaran pengadaan printer pendukung pembelajaran fakultas kedokteran	537112	49.950.000
6	TU Fakultas Kedokteran	11/12/2023	Pembayaran pengadaan lab fakultas kedokteran	537112	30.000.000
7	TU Fakultas Kedokteran	11/12/2023	Pembayaran pengadaan alat laboratorium fakultas kedokteran	537112	74.800.000

**Gambar 1.** Daftar pengadaan barang dan jasa

Sumber: Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Universitas ABC

## 2) Melakukan Vouching

Pemeriksaan bukti pendukung diawali dengan menganalisis transaksi, selanjutnya auditor meminta dokumen yang menjadi dasar terjadinya suatu transaksi untuk divalidasi dan memastikan kebenaran dalam penyajian data pada catatan akuntansi. Prosedur vouching digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya salah saji dalam kemungkinan penyajian yang lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya dalam catatan akuntansi. Oleh sebab itu prosedur ini sangat penting dilakukan agar mendapatkan bukti pendukung yang berkaitan dengan asersi keberadaan dan keterjadian.

Dokumen-dokumen yang penting yang bisa dikumpulkan oleh auditor ketika melakukan vouching adalah kontrak perjanjian, surat pesanan, kwitansi, surat perintah membayar, dan berita acara.

KODE RUP/AKUN		URAIAN	TGL	NOMINAL	KETERANGAN			
991111	Pengadaan Alat Lab. Pembelajaran & Mikroskopik Fak. Kedokteran	07-Nov-23	849.150.000	V	Surat Perintah Membayar : LS/150910100/2023/11/0002 Kwitansi Tgl 15/02/23 Rp 849.150.000- Berita Acara Pembayaran : 2443/UN22.13/PL.01.00/2023 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : 2548/UN22.13/PL.01.00/2023 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 2347/UN22.13/PL.01.00/2023 Lampiran Adendum Surat Perjanjian : 2232/UN22.13/PL.00.02/2022 Berita Acara Adendum Pekerjaan : 2232/UN22.13/PL.00.02/2022	07/11/2023	Selesai	Dokumen Lengkap
991111	Pembayaran Pengadaan Komputasi Fak. Kedokteran	21-Nov-23	148.600.000	V	Surat Perintah Membayar : LS/150910100/2023/11/0010 Permohonan Pembayaran : 18/PP-03/TW4/XI/2023 Kwitansi Tgl 16/11/2023 Rp 148.600.000- Berita Acara Pembayaran : 18541/UN22.13/PL.01.00/2023 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : 18295/UN22.13/PL.01.00/2023 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 18294/UN22.13/PL.01.00/2023 Surat Pesanan : 17422/UN22.13/PL.01.00/2023	21/11/2023 17/11/2023	Selesai	Dokumen Lengkap

**Gambar 2.** Vouching Pengadaan barang dan jasa pada Universitas ABC

Sumber: KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Cabang Surabaya)

Berikut pemaparan auditor terkait vouching:

*“Untuk meyakini bahwa nilai pengadaan barang dan jasa yang dicatat telah benar dan telah memenuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dokumen pendukung valid jika terbukti asli,*

*dengan ditandatangani secara lengkap oleh yang berwenang, nilainya sesuai, dan dokumennya lengkap”.*

Berdasarkan penjelasan dari auditor vouching memiliki peran penting yang harus diterapkan dalam melakukan tes kepatuhan belanja yang berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada auditor dengan cara memvalidasi nilai dan dokumen yang menjadi pendukung pengadaan barang dan jasa. Dokumen pendukung bisa diyakini kebenarannya apabila dokumen tersebut asli. Sehingga dari tampilan tabel 1 yaitu pengadaan barang dan jasa “Pembayaran pengadaan lab. pembelajaran dan mikroskopik fak. kedokteran” senilai Rp849.150.000 bisa diyakini kebenarannya dengan memvalidasi dokumen-dokumen pendukung yang telah dibuktikan dengan vouching yang dilakukan pada tabel 2.

### 3) Kertas Kerja Pemeriksaan Tes Kepatuhan Belanja

Audit Kepatuhan merupakan audit untuk menentukan pelaksanaan proses kerja, apakah pihak yang diaudit sudah melakukan prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Sehingga tidak ada tindakan penyelewengan terhadap peraturan maupun regulasi yang berlaku.

*“Untuk memastikan bahwa belanja telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku”*

Berdasarkan paparan tersebut tes kepatuhan belanja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh KAP Kanaka melibatkan prosedur pemeriksaan secara sistematis untuk dapat memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

#### Tata Cara Tes Kepatuhan Belanja

Saat melakukan tes kepatuhan belanja yang harus kita perhatikan adalah prosedurnya. Pada tes kepatuhan belanja yang diterapkan oleh KAP Kanaka prosedur tes kepatuhan belanja berkaitan dengan kepatuhan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, prosedur tes kepatuhan belanja telah dijabarkan pada Kertas Kerja seperti gambar di bawah:

TEST PROCEDURES PERFORMED	
<b>Kepatuhan Pengendalian Internal</b>	
1	Unit kerja menyampaikan Rencana Pengadaan Barang/Jasa yang telah tertuang di dalam RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) kepada Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
2	Bagian perlengkapan mengajukan Perhitungan Anggaran Biaya Unit Kerja sebagai rekapitulasi dari Surat Permintaan dari masing-masing unit kepada bagian perencanaan untuk disetujui. Terdapat tanda tangan masing-masing pimpinan unit dalam
3	Bagian perencanaan menerbitkan DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) dan RKAKL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga) yang disahkan oleh Rektor sebagai wujud untuk pengesahan dari Perhitungan Anggaran Biaya Unit
4	Pejabat pengadaan barang dan jasa membuat formulir RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat, untuk lelang) dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditandatangani olehnya dan atau tim pengadaan (jika ada panitia).
5	Pejabat pengadaan barang dan jasa mengundang secara tertulis kepada peserta untuk memasukkan surat penawaran.
6	Terdapat surat penawaran dari supplier sesuai dengan undangan yang dikirimkan oleh Universitas.
7	Supplier harus melampirkan dokumen-dokumen resmi Perusahaannya seperti: SIUP, TDP, SITU, Surat referensi Bank, NPWP, jaminan pelaksanaan dan akta sebagai persyaratan administrasi dan membuat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh
8	Terdapat Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Surat Penawaran yang ditandatangani oleh pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa sebagai tindak lanjut evaluasi atas surat penawaran.
9	Setelah evaluasi dilakukan negosiasi harga dengan supplier, dimana hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran yang ditandatangani oleh supplier dan pejabat/panitia pengadaan.
10	Setelah panitia menetapkan suppliernya, maka pejabat/panitia pengadaan akan membuat surat Usulan Penetapan Pemenang yang ditandatangani dan ditujukan kepada Rektor Cq. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (KBAUK) untuk
11	Rektor atau Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan yang mengatasnamakan rektor akan mengeluarkan surat keputusan penetapan pemenang pengadaan dan pejabat/panitia pengadaan menerbitkan pengumuman pemenang.
12	Terdapat kontrak atau Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) dan ditandatangani oleh PPK apabila pengadaan langsung dan oleh Rektor atau KBAUK a/n Rektor.
13	Terdapat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa pada saat penerimaan barang/jasa dan pengecekan progress pekerjaan jasa yang ditandatangani oleh tim penerima (3 orang), user dan atau ahli yang mendampingi tim.
14	Kemudian PPK Berita Acara Pembayaran setelah dibuatnya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa sesuai dengan harga yang disepakati dalam SPK.
15	Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran tingkat Fakultas) membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang ditujukan kepada Biro Administrasi / Rektor) agar dilakukan pembayaran ke supplier.
16	Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana PNBPU Universitas akan membuat kwitansi (Bon Faktur) sebagai bukti telah

**Gambar 3.** Prosedur kepatuhan belanja kepatuhan pengendalian internal

Sumber: KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Cabang Surabaya)

<b>Kepatuhan Perundang-undangan</b>	
17	Sesuai dengan Keppres 54/2012 Pejabat Pengadaan, menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
18	Pemilihan penyedia barang /jasa pada prinsipnya harus melalui pelelangan umum, kecuali jika penyedia barang/jasa terbatas, tidak efisien dari segi biaya pelelangan dan dalam keadaan tertentu dan khusus, maka dapat dilaksanakan melalui pelelangan
19	Atas penawaran yang masuk harus dilakukan evaluasi sesuai dengan Keppres 54/2010 Pasal 49.
20	Proses persiapan, pelaksanaan dan pemilihan penyedia barang/jasa harus sesuai dengan Keppres 50/2010 Pasal 35 s/d 49.
21	Kontrak yang dibuat sesuai dengan Keppres 54/2010 Pasal 51 s/d 54.
22	Prosedur penerbitan SPM (harus dilengkapi dengan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan Ringkasan Kontrak), harus sesuai dengan Per 66 tahun 2005 Pasal 4 ayat 6a dan 5.
23	Prosedur untuk memperoleh SP2D, harus sesuai dengan Per 66 tahun 2005 Pasal 8.

**Gambar 4.** Prosedur kepatuhan belanja kepatuhan perundang-undangan

Sumber: KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Cabang Surabaya)

Apabila kita analisis secara detail prosedur-prosedur pada gambar di atas, telah penulis laksanakan pada saat memvalidasi dokumen pendukung pada tahap vouching. Auditor memeriksa secara teliti dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian dengan informasi yang tercatat dalam catatan akuntansi. Pada tahap vouching akan ditekankan untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung yang isinya memuat nama transaksi, nominal transaksi, serta otorisasi dari pihak yang berwenang. Apabila transaksi memiliki masalah seperti dokumen pendukung yang tidak lengkap maka akan diberi catatan di sebelah nama transaksi terkait permasalahannya agar memudahkan auditor untuk melakukan verifikasi kepada pihak terkait.

Setelah penulis memahami tentang prosedur tes kepatuhan belanja, lebih lanjut penulis memahami bagaimana pemberian *tickmark*. *Tickmark* dalam konteks audit adalah simbol atau tanda yang digunakan oleh auditor untuk menandai dokumen atau catatan yang telah diperiksa atau diverifikasi selama proses audit. *Tickmark* digunakan sebagai alat untuk melacak aktivitas audit dan memudahkan komunikasi antara auditor yang melakukan pemeriksaan dan yang meninjau hasil audit.

<b>Tick Legend:</b>	
✓	Attribute satisfied. No exception noted.
☒ ✓	Attribute not satisfied, but with Remarks and still acceptable. Considered No exception.
✗	Attribute not satisfied. Exception noted.
n/a	Attribute not applicable.

**Gambar 5.** *Tickmark* audit kepatuhan belanja

Sumber: KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Cabang Surabaya)

*Tickmark* biasanya ditempatkan di samping atau di atas dokumen atau catatan yang diperiksa untuk membantu auditor dalam mengorganisir dan memantau progress pemeriksaan, serta memudahkan pembuatan laporan audit akhir. Setiap firma audit atau auditor dapat memiliki sistem *tickmark* yang sedikit berbeda tergantung pada kebijakan internal dan preferensi masing-masing.

Setelah penulis memahami pemberian *tickmark*, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengisi kertas kerja pemeriksaan tes kepatuhan belanja seperti tabel di bawah ini.

<b>Sample No.</b>	<b>Sample Description</b>		
	<b>Ref Doc (SPJ)</b>	<b>Ref Date</b>	<b>Details</b>
1	LS/150910100/2023/11/0002	7-Nov-23	849.150.000,00

**Tabel 6.** Sampel vouching pada kertas kerja tes kepatuhan belanja

Sumber: KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Cabang Surabaya)

Pada saat mengisi kertas kerja pemeriksaan pada Universitas ABC transaksi yang telah divalidasi melalui vouching akan dilakukan sampling kembali untuk memeriksa kepatuhan belanja pada Universitas ABC secara keseluruhan.

**Gambar 7.** Tes prosedur pengadaan barang dan jasa

Sumber: KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Cabang Surabaya)

Ketika melakukan vouching akan diketahui ada atau tidaknya dokumen yang bermasalah. Pada transaksi “pengadaan alat lab. pembelajaran & mikroskopik FK senilai Rp849.150.000” tidak memiliki dokumen pendukung yang bermasalah dan telah lengkap seperti yang telah dijelaskan pada tabel 3 dan tabel 4 maka pada tabel *key control selected for testing* bisa dicentang dengan warna hijau tua pada prosedur satu sampai prosedur dua puluh tiga.

Audit Remarks	No & Tgl Kontrak
- Pengadaan Alat Lab. Pembelajaran & Mikroskopik FK 2023 Senilai Rp 849.150.000	LS/150910100/2023/11/0002 07-Nov-23 Nuragada Abadi
- Pembayaran atas Pengadaan Komputasi Fak. Kedokteran 2023 Senilai Rp 148.600.000	LS/150910100/2023/11/0010 21/11/2023 PT. Wibisana Kaya Utama
- Pembayaran atas pengadaan Alat Lab. Jurusan Farmasi Fak. Kedokteran 2023 Senilai Rp 179.420.000	LS/150910100/2023/12/0010 14-Dec-23 PT ELO KARSA UTAMA

**Gambar 8.** Audit remarks pada pengadaan barang dan jasa

Sumber: KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Cabang Surabaya)

Ketika melakukan tes pengadaan barang dan jasa pada Universitas ABC, penulis menemukan adanya dokumen pendukung yang belum terotorisasi oleh pihak yang berwenang, padahal seharusnya semua dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa sudah melalui persetujuan oleh pihak yang berwenang pada Universitas ABC.



## KESIMPULAN

Audit kepatuhan belanja yang telah dilakukan oleh KAP Kanaka pada Universitas ABC telah berjalan sesuai dengan prosedur audit sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Prosedur audit kepatuhan belanja pada Universitas ABC dilakukan dengan cara meminta data pada klien, kemudian melakukan sampling, meminta data pada klien, melakukan vouching, melakukan konfirmasi apabila menemukan hal-hal yang kurang jelas.

Hasil pengujian yang berkaitan dengan tes kepatuhan belanja yang dilakukan KAP Kanaka menunjukkan bahwa Universitas ABC telah memenuhi hal-hal yang material baik kepatuhan pengendalian secara internal maupun kepatuhan pada perundang-undangan. Secara nilai dan transaksi tidak ditemukan perbedaan pencatatan, sehingga dapat dipastikan bahwa transaksi telah tersaji secara akurat. Namun, pada dokumen pendukung telah ditemui ada beberapa dokumen yang belum diotorisasi oleh pejabat terkait, oleh karena itu untuk kedepannya diperlukan pengawasan terhadap kelengkapan persetujuan dokumen. Permasalahan tersebut telah dikonfirmasi kepada manajemen dan manajemen mengakui bahwa dokumen tersebut terlewat untuk ditandatangani. Hal tersebut bukanlah temuan yang material, tetapi dokumen tersebut merupakan dokumen untuk mencegah adanya fraud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. M. D. M. (2021). Populasi dan Sampel. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, 14(1), 103–116.
- Alfuzanni, A., & Djamil, N. (2019). Peran Satuan Pemeriksaan Internal untuk Mewujudkan Good University Governance dengan Audit Kepatuhan sebagai Variable Moderating. *Sorot*, 14(2), 41. <https://doi.org/10.31258/sorot.14.2.41-51>
- IAPI. (2008). Sa 530. In *Standar Profesional Akuntan Publik* (pp. 1–18).
- Muniroh, N., & Suryatimur, K. P. (2021). Peran Auditor Internal dan Auditor Eksternal dalam Mendeteksi Fraud Asset Misappropriation. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 4(2), 207. <https://doi.org/10.32663/jaz.v4i2.2444>
- Ramadhany, A. A., Fadlilah, A. H., & Masiam, S. (2021). Prosedur Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik Ery dan Rekan. *Realible Accounting Journal*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.152>
- Sa'adah, M., Rahmayati, G. T., & Prasetyo, Y. C. (2022). Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 61–62. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/download/1113/408%0A>. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/view/1113>
- Suwandi, E. D. (2021). Kualitas Audit Perusahaan pada Masa Pandemic Covid 19 (Studi Literatur). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 27–36. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4646>